

Konflik Siber dan Keamanan Nasional: Analisis Penyebaran Narasi Separatis OPM di Media Sosial

Mala Hayati¹, Yusuf Ali², Irwan Triadi³, Rachmat Setyawibawa⁴, Arifuddin Uksan⁵

¹Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia
E-mail: mala.hayati@kn.idu.ac.id

Article History:

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 28 November 2025

Accepted: 04 Desember 2025

Keywords: *Siber, Keamanan Nasional, Media Sosial, Separatis*

Abstract: *Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma keamanan nasional dari dimensi militeristik menuju ancaman multidimensi yang mencakup ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyebaran narasi separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di media sosial, khususnya TikTok, serta menilai implikasinya terhadap keamanan nasional Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis konten, penelitian ini menelaah representasi simbolik, naratif, dan visual dalam konten digital yang diproduksi sepanjang tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena strategis bagi perang informasi (information warfare) di mana aktor non-negara memanfaatkan ruang siber untuk membentuk opini publik melalui strategi soft power dan kekerasan simbolik (Bourdieu, 1991). Narasi separatis dikemas dalam bentuk video pendek, konten permainan (game-based content), dan musik emosional yang secara halus menanamkan empati terhadap ide separatis di kalangan generasi muda. Fenomena ini berpotensi melemahkan legitimasi negara dan memperkuat disintegrasi sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan pertahanan siber nasional, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi partisipasi publik dalam sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) guna memperkuat kedaulatan informasi dan menjaga stabilitas nasional di era digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah sudut pandang keamanan nasional secara fundamental. Teknologi yang awalnya dikembangkan oleh militer Amerika untuk mempermudah pertukaran data dan komunikasi kini telah merambah hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hingga budaya. Kemajuan ini tidak hanya

memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, tetapi juga menimbulkan bentuk ancaman baru terhadap stabilitas dan keamanan negara. Arus informasi yang bersifat cepat, terbuka, dan lintas batas telah membuat ruang digital menjadi arena strategis baru bagi penyebaran pengaruh, termasuk ideologi yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Salah satu produk dari kemajuan teknologi informasi yang paling berpengaruh adalah media sosial. Saat ini, media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang ideologis dan arena konflik siber yang melibatkan aktor negara maupun non-negara. Kelompok radikal dan teroris sangat diuntungkan dan menikmati hadirnya produk teknologi berbasis jaringan internet seperti media sosial untuk kepentingan rekrutmen, media propaganda, pendidikan, pelatihan, dan pembinaan jaringan mereka (Ghifari, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi medium yang efektif dalam menyebarkan ideologi ekstrem dan menggerakkan dukungan sosial tanpa perlu kekuatan fisik.

Pemerintah Indonesia telah lama menyadari potensi ancaman siber terhadap keamanan nasional. Kesadaran tersebut diwujudkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber, disebutkan bahwa serangan siber dapat dilakukan oleh aktor negara (*state actor*) maupun non-negara (*non-state actor*). Hal ini diperkuat dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk konflik kontemporer adalah *proxy war*, di mana dominasi terhadap suatu negara tidak lagi dilakukan dengan kekuatan senjata, melainkan melalui penciptaan kondisi sosial-politik yang tidak stabil dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (Kementerian Pertahanan, 2015). Penciptaan kondisi melalui propaganda oleh aktor negara maupun non-negara dilakukan dengan memanfaatkan ruang siber sebagai sarana utama, oleh karenanya hal ini dapat mengancam keamanan nasional suatu bangsa (Kementerian Pertahanan, 2015). Pernyataan tersebut kemudian semakin mempertegas bahwa dimensi ancaman keamanan kini telah bergeser dari fisik ke digital.

Pemahaman tentang keamanan nasional tidak lagi terbatas pada aspek militer semata, tetapi juga mencakup sektor non-militer yang terintegrasi dalam sistem pertahanan negara. Keamanan nasional dapat dimaknai sebagai kemampuan pemerintah dalam melindungi suatu negara dari ancaman dalam maupun luar negeri sehingga tercapainya kondisi yang aman (Santoso, 2025). Keamanan nasional pada abad ke-21 harus dipahami secara komprehensif di mana melibatkan dimensi sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan informasi karena ancaman kontemporer dapat muncul melalui ruang siber maupun media digital yang bersifat non-konvensional (Santoso, 2025). Dalam konteks tulisan ini, aktivitas digital yang menyebarkan ide separatistis seperti yang Organisasi Papua Merdeka (OPM) dapat dikategorikan sebagai ancaman non militer terhadap keamanan nasional, karena mempengaruhi kesadaran publik dan legitimasi negara.

Untuk dapat memahami mengapa kemudian sosial media muncul sebagai media yang dianggap paling disukai kelompok radikal, dalam menyebarkan pahamnya adalah akibat tingginya angka pengguna sosial media di Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penggunaan media sosial tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan *We Are Social*, terdapat 185,3 juta pengguna internet dan 139 juta pengguna media sosial di Indonesia. Platform TikTok bahkan menempati posisi keempat dalam jumlah pengguna terbanyak, dengan 73,5% dari total pengguna media sosial aktif di Indonesia (CNBC Indonesia, 2024). Tingginya angka penggunaan media sosial ini kemudian memberikan peluang besar bagi penyebaran informasi, tetapi sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap konten radikal dan disinformasi. Media sosial dapat memicu konflik di masyarakat jika penggunaannya tidak bijak dalam memfilter konten-konten yang ada di media sosial (Hanifah Nur Erma dkk, 2021).

Salah satu bentuk kegagalan proses filterisasi konten di media sosial dapat dilihat dari munculnya berbagai aktivitas digital bernuansa radikal dan separatistis, seperti kampanye daring yang dilakukan oleh akun-akun anonim yang menyebarkan narasi perjuangan OPM. Aktivitas digital tersebut menunjukkan bahwa media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen ideologis dalam membangun narasi politik dan identitas kelompok tertentu. Dalam berbagai kasus, konten yang diunggah menampilkan simbol perjuangan Papua, lagu mars OPM, serta visualisasi peta wilayah Papua yang dipadukan dengan elemen hiburan seperti permainan (*game-based content*) dan video pendek di TikTok. Bentuk representasi semacam ini memiliki daya tarik tersendiri bagi generasi muda karena dikemas dalam format yang ringan, interaktif, dan menghibur, namun secara halus berpotensi menanamkan empati terhadap ide separatistis tanpa disadari oleh penggunanya.

Fenomena ini dapat dipahami melalui Teori Perang Informasi (Information Warfare Theory) yang dikemukakan oleh Thomas (1996) dan Nissen (2015). Menurut Thomas (1996), perang informasi adalah “penggunaan dan pengelolaan informasi untuk memperoleh keunggulan strategis terhadap pihak lawan dalam ranah politik, militer, maupun sosial”. Sementara Nissen (2015) menegaskan bahwa “informasi tidak lagi sekedar alat komunikasi, melainkan senjata untuk mempengaruhi legitimasi dan persepsi publik dalam konteks konflik modern”. Berdasarkan teori ini, penyebaran konten OPM di media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk perang informasi non-konvensional, di mana ruang digital dimanfaatkan untuk membentuk opini publik dan menarik simpati internasional terhadap gerakan separatistis.

Selain itu, dinamika penyebaran narasi digital ini juga dapat dijelaskan melalui Teori Kekerasan Simbolik (Bourdieu, 1991). Kekerasan simbolik terjadi ketika makna dan simbol yang dihasilkan oleh pihak dominan diterima secara tidak sadar oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar (Bourdieu, 1991). Dengan demikian, konten-konten digital bernuansa separatistis yang tersebar di media sosial dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan simbolik karena secara halus menanamkan ide separatistis dalam kesadaran publik tanpa adanya kekerasan fisik.

Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam di tengah era globalisasi dan transformasi digital, di mana ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga muncul dalam bentuk ancaman non-fisik bahkan hibrida (*hybrid threats*) yang memadukan aspek teknologi, psikologis, dan ideologis. Ancaman tersebut semakin berbahaya mengingat tingginya jumlah pengguna media sosial di Indonesia, serta jenis konten soft power yang dikemas dengan cara menarik, ringan, dan mudah dipahami. Konten semacam ini sangat mudah memperoleh simpati masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.

Jika fenomena ini tidak segera diperhatikan dan dikaji secara serius, maka semakin banyak generasi muda yang berpotensi terpapar oleh paham dan teori dari kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Kondisi ini tentu akan sangat membahayakan keamanan nasional karena dapat memperkuat penyebaran ideologi yang mengancam persatuan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, perhatian khusus dan penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari penyebaran konten digital tersebut di era transformasi teknologi ini.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menjelaskan mekanisme penyebaran konten interaktif yang berpotensi menormalisasi ide separatistis di kalangan generasi muda, serta menilai dampak aktivitas digital tersebut terhadap keamanan nasional Indonesia, khususnya dalam konteks konflik siber dan pertahanan non-militer.

LANDASAN TEORI (Times New Roman, size 12) (Jika Ada)

Teori Kekerasan Simbolik (Symbolic Violence Theory). Teori ini menjelaskan bahwa dominasi ideologis dapat terjadi tanpa kekerasan fisik, tetapi melalui simbol, bahasa, dan makna yang diterima secara tidak sadar oleh masyarakat. Kekerasan simbolik bekerja secara halus ketika individu menerima struktur sosial atau ide dominan sebagai sesuatu yang wajar. Kekerasan simbolik terjadi ketika makna dan simbol yang dihasilkan oleh pihak dominan diterima secara tidak sadar oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar' (Bourdieu, 1991, hlm. 55). Dengan demikian, konten-konten digital bernuansa separatis yang tersebar di media sosial dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan simbolik karena secara halus menanamkan ide separatis dalam kesadaran publik tanpa adanya kekerasan fisik.

Konsep Keamanan Nasional dan Pertahanan Siber. Dalam *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, disebutkan bahwa ancaman terhadap negara tidak lagi hanya bersifat fisik (militer), tetapi juga non-militer dan siber. Konflik modern sering terjadi dalam bentuk proxy war, di mana aktor negara atau non-negara menggunakan ruang siber untuk melemahkan stabilitas sosial-politik dan legitimasi negara. Konsep ini digunakan untuk menegaskan bahwa penyebaran propaganda OPM di media sosial adalah bagian dari ancaman keamanan nasional non-militer. Dengan demikian, ruang siber menjadi medan baru dalam strategi pertahanan negara, dan propaganda digital dianggap sebagai bagian dari perang ideologi dalam konteks keamanan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memiliki metode analisis dari konten terhadap materi digital yang beredar di media sosial TikTok, terutama yang berkaitan dengan kampanye daring dan penyebaran narasi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik pesan-pesan simbolik yang terkandung dalam konten digital serta menginterpretasikan pola representasi ideologis yang muncul di ruang siber.

Pilihan ini sejalan dengan peran media sosial yang memegang peran penting dalam memberikan informasi terhadap isu-isu radikalisme sehingga masyarakat terpropaganda terhadap isu-isu radikal (Ghifari, 2017). Oleh karena itu, analisis konten digital menjadi penting untuk mengidentifikasi bagaimana pesan, simbol, dan narasi tertentu digunakan untuk membentuk opini publik dan menormalisasi ide separatisme. Dalam konteks ini, penelitian berupaya menggali dinamika komunikasi siber yang bersifat non-verbal, visual, dan interaktif melalui konten video pendek, yang dikemas dalam bentuk video permainan (*game-based content*), serta unggahan viral yang berkaitan dengan isu Papua.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan fokus pada mekanisme penyebaran konten interaktif yang berpotensi menormalisasi ide separatis di kalangan generasi muda, yang berfokus pada fenomena sosial di ruang digital, bukan pada pengukuran statistik. Peneliti berusaha menafsirkan bagaimana media sosial berfungsi sebagai sarana baru untuk konflik ideologis dan simbolik yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Selain itu penelitian ini juga ingin memberikan gambaran bagaimana kampanye ideologi pada era globalisasi lebih banyak menggunakan *soft power* dengan menyusup pada konten sosial media dibanding dengan *hard power*. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan karakteristik dan strategi penyebaran konten, sedangkan analisis interpretatif digunakan untuk memahami pesan-pesan implisit yang terkandung dalam representasi digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

1. Data primer, berupa konten digital yang diambil dari platform media sosial khususnya TikTok yang menampilkan simbol, narasi, atau atribut yang berkaitan dengan OPM. Konten yang diamati meliputi video, musik, gambar, deskripsi unggahan, serta interaksi pengguna (komentar, like, dan share) yang memperlihatkan bentuk penyebaran dan penerimaan publik. Konten-konten ini berfokus pada konten yang di produksi pada tahun 2024 di mana isu terkait OPM menjadi *trending topic* di sosial media TikTok.
2. Data sekunder, meliputi laporan resmi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (seperti *Buku Putih Pertahanan Indonesia* tahun 2015), dokumen kebijakan siber, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai radikalisme digital, konflik sosial, dan keamanan nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi daring (*online observation*) dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan konten viral yang relevan. Peneliti menelusuri hashtag, komentar, dan tren video yang menampilkan simbol atau narasi OPM dalam periode tertentu. Langkah ini serupa dengan metode penelitian terdahulu terkait dengan media sosial, di mana dijelaskan bahwa analisis dilakukan dengan mengamati pola komunikasi dan interaksi masyarakat di media sosial untuk memahami sumber konflik dan dampaknya (Hanifah Nur Erma dkk, 2021). Selain itu, dilakukan studi literatur terhadap berbagai penelitian, artikel akademik, dan laporan pemerintah untuk memperkuat interpretasi hasil observasi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis wacana kritis sebagaimana dikembangkan oleh Fairclough (1995), yang mencakup tiga dimensi utama: analisis teks (struktur pesan dan simbol), praktik diskursif (cara konten diproduksi dan disebarkan), dan praktik sosial (konteks sosial-politik di balik penyebaran konten). Dengan metode ini, peneliti dapat mengaitkan bentuk visual dan naratif dalam konten OPM dengan konteks yang lebih luas mengenai keamanan nasional dan konflik siber.

Sebagai penguat, temuan penelitian ini juga mengacu pada pendekatan studi keamanan non-tradisional, dimana ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berupa serangan fisik, tetapi juga dapat muncul dari penyebaran ideologi dan disinformasi di ruang digital. Dalam konteks penelitian ini, lemahnya filterisasi konten digital menjadi bentuk baru dari celah keamanan nasional yang memungkinkan ide separatisme berkembang tanpa disadari oleh masyarakat.

Dengan demikian, metode analisis konten dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkap pola penyebaran ide separatis dalam kampanye digital OPM, memahami strategi penyamaran pesan ideologis melalui format hiburan, serta menilai implikasinya terhadap stabilitas dan ketahanan nasional Indonesia dalam dimensi konflik siber non-konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era globalisasi perkembangan teknologi informasi telah mengubah konsep keamanan nasional dari yang semula bersifat fisik dan dianggap berfokus pada militeristik menjadi bersifat multidimensi. Digitalisasi menciptakan ruang baru yang melampaui batas-batas geografis dan waktu, di mana data dan informasi menjadi instrumen strategis bagi pertahanan negara. Dalam konteks ini, keamanan nasional adalah kemampuan pemerintah dalam melindungi suatu negara

dari ancaman dalam maupun luar negeri sehingga tercapainya kondisi yang aman (Santoso, 2023). Pada abad ke-21 keamanan nasional harus bersifat adaptif dan kenyal, artinya harus dapat beradaptasi dengan masalah dan ancaman yang makin beranekaragam saat ini, salah satu ancaman yang nyata adalah ancaman siber.

Dalam konteks keamanan digital nasional, masyarakat memiliki posisi strategis sebagai lapisan pertahanan nonmiliter yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan negara dari dalam. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan informasi tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup kesadaran kritis terhadap arus informasi serta kemampuan dalam memilah kebenaran data di ruang siber. Keamanan siber tidak dapat ditegakkan hanya melalui perangkat hukum dan teknologi, tetapi membutuhkan partisipasi aktif publik yang didukung oleh tingkat literasi digital yang memadai dan kesadaran terhadap ancaman ideologis yang beredar di media sosial. Dalam hal ini, literasi digital menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keamanan nasional di era informasi modern.

Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali pola propaganda, disinformasi, dan narasi separatis dapat berperan sebagai filter sosial terhadap penyebaran ideologi yang berpotensi mengancam integritas bangsa. Dengan demikian, keberhasilan sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) di era digital tidak hanya diukur dari kekuatan militer negara, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berpartisipasi aktif sebagai penjaga kedaulatan informasi dan stabilitas nasional di dunia maya. Pentingnya peran masyarakat ini semakin menonjol mengingat tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia, yang menjadikannya ruang vital bagi pertukaran informasi dan penyebaran konten yang bersifat konstruktif maupun destruktif terhadap keamanan nasional.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, aktivitas digital masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan *We Are Social* tahun 2024, Indonesia memiliki 185,3 juta pengguna internet dan 139 juta pengguna media sosial, dengan TikTok menempati posisi keempat sebagai platform yang paling banyak digunakan (CNBC Indonesia, 2024). Media sosial tidak hanya unggul dalam jumlah pengguna, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, mulai dari komunikasi dan perdagangan hingga penyebaran kampanye mengenai isu-isu sosial. Hal ini dikarenakan media sosial memiliki daya jangkauan yang lebih luas dan kecepatan penyebaran informasi yang lebih tinggi dibandingkan media konvensional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah bertransformasi dari sekadar sarana komunikasi dan hiburan menjadi arena pertarungan ide dan opini publik. Dalam ruang digital ini, berbagai pihak berlomba membentuk narasi dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai isu nasional. Peran media sosial sebagai medium strategis dalam dinamika sosial-politik ini menuntut pemahaman yang mendalam mengenai dampak dan mekanisme penyebaran konten agar dapat mengantisipasi potensi pengaruh negatif terhadap stabilitas dan keamanan nasional.

Akan tetapi, kemudahan akses informasi ini juga menimbulkan kerentanan baru terhadap keamanan nasional. Beberapa hal yang dapat muncul antara lain konflik, atau penyebaran paham radikalisme. Media sosial dapat memicu konflik di masyarakat jika penggunaannya tidak bijak dalam memfilter konten-konten yang ada di media sosial (Hanifah Nur Erma dkk, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin meningkat aktivitas digital masyarakat, semakin besar pula potensi penyebaran informasi yang bersifat provokatif, manipulatif, bahkan radikal.

Dalam konteks ini, lemahnya literasi digital berperan penting dalam memperbesar peluang penyebaran konten yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Salah satu manifestasi nyata dari lemahnya filterisasi digital adalah munculnya konten-konten bernuansa separatistis dan radikal di ruang siber, khususnya yang berkaitan dengan narasi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aktivitas digital yang dilakukan oleh akun-akun anonim dan komunitas daring khususnya di media sosial TikTok memperlihatkan upaya sistematis dalam membangun citra perjuangan OPM sebagai gerakan heroik.

Konten-konten bertema OPM mulai banyak diproduksi sejak akhir tahun 2023 dan mencapai puncak popularitasnya pada tahun 2024, ketika sejumlah video masuk dalam daftar trending search di aplikasi TikTok. Mayoritas konten ini berbentuk video pendek berdurasi 1 hingga 3 menit yang menampilkan visual dari permainan *Roblox*. Dalam beberapa video, tampak cuplikan *gameplay* pemain yang sedang berlari atau melakukan aktivitas dalam permainan, sementara pada video lain hanya ditampilkan karakter *Roblox* yang bergerak disertai dengan latar lagu bertema perjuangan dengan lirik seperti “*Papua merdeka, merdeka Papua.*” Selain itu, terdapat pula video yang menampilkan simulasi pertempuran antara Brimob dan kelompok OPM, yang sering dikaitkan dengan beredarnya video kekerasan pada tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM terhadap aparat keamanan. Representasi semacam ini membangun citra heroik terhadap OPM dan menggambarkan aparat negara sebagai pihak agresor.

Tidak berhenti sampai disitu, beberapa video juga menambahkan narasi eksplisit yang menyatakan keinginan Papua untuk merdeka, disertai penggambaran kelompok bersenjata OPM sebagai pihak yang “mempertahankan tanah leluhur” dari apa yang mereka sebut sebagai pendatang. Narasi tersebut menunjukkan bagaimana ruang digital digunakan untuk membentuk persepsi publik tentang konflik Papua secara sepihak dan emosional. Diskusi mengenai konten semacam ini kemudian meluas ke bagian komentar, yang menjadi ruang bagi pengguna lain untuk mengekspresikan opini dan simpati terhadap gerakan separatistis. Banyak komentar yang menyuarakan empati terhadap OPM, bahkan memposisikan aparat keamanan sebagai simbol penindasan. Komentar seperti “*pelan-pelan pace tunjukkan Papua sedang terluka*” atau “*lagu OPM lama-lama diputar enak juga,*” menunjukkan adanya penerimaan simbolik terhadap narasi separatistis. Selain itu, komentar lain seperti “*ati-ati pace, TNI su dekat,*” semakin memperkuat kesan antagonistik terhadap aparat negara.

Fenomena ini diperkuat dengan munculnya video serupa di platform lain yang memanfaatkan visualisasi *game* dan musik emosional untuk menyampaikan pesan ideologis. Salah satu contoh menampilkan potongan lirik “*satukan nasib, menentukan kebebasan bangsa kami, Papua,*” yang diunggah oleh akun anonim bernama *Haru*, dan mendapatkan banyak komentar positif, termasuk dari akun *romadhni_* yang menulis “senang karena lagu ini sudah memiliki subtitle.” Sementara akun lain bernama *Rapp* secara terang-terangan menulis “*ayo pace lawan sistem NKRI.*” Interaksi semacam ini memperlihatkan bagaimana konten digital yang dikemas secara ringan justru dapat menimbulkan normalisasi simpati terhadap narasi separatistis dan berpotensi memperluas penyebaran ideologi separatisme di kalangan pengguna muda.

Meski begitu, sejumlah konten tersebut kini telah dihapus oleh pihak TikTok. Penghapusan ini menandakan adanya upaya platform digital dalam mengendalikan penyebaran konten bermuatan radikal dan separatistis, meskipun fakta bahwa konten tersebut sempat menjadi tren menunjukkan tingginya tingkat interaksi publik terhadap isu tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat digital Indonesia memiliki tingkat keterlibatan tinggi dalam

isu-isu yang bersifat sensitif, baik karena rasa penasaran, empati, maupun sekadar mengikuti tren. Namun, tingginya atensi ini juga dapat menjadi indikator kerentanan informasi nasional, karena ruang digital yang terbuka dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk menyebarkan disinformasi dan membangun narasi tandingan terhadap legitimasi negara.

Dalam konteks keamanan nasional, konten-konten semacam ini tidak dapat dipandang sebagai ekspresi bebas belaka, melainkan sebagai bagian dari perang ideologis di ruang siber yang memiliki potensi besar dalam mempengaruhi persepsi publik dan melemahkan legitimasi negara. Konten-konten seperti ini juga rawan menyusupkan ideologi radikal kepada golongan anak muda yang rentan karena tidak memiliki pemahaman literasi yang baik, tetapi mereka lebih mempercayai narasi-narasi apa yang diungkapkan di media sosial TikTok dibanding mencoba mengakses informasi dari media konvensional atau bahkan dari artikel dan buku ilmiah.

Kemampuan media sosial dalam menyebarkan pesan dengan cepat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok separatis melalui penggunaan strategi interaktif dan visual yang menarik terutama bagi generasi muda. Narasi perjuangan OPM dikemas melalui video pendek, konten *game play*, dan simbol-simbol identitas Papua yang disandingkan dengan musik dan slogan perjuangan yang ringan sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik pada konten tersebut.

Pendekatan ini dapat dijelaskan melalui Teori Perang Informasi (*Information Warfare Theory*) dari Thomas (1996) dan Nissen (2015). Perang informasi adalah penggunaan dan pengelolaan informasi untuk memperoleh keunggulan strategis terhadap pihak lawan dalam ranah politik, militer, maupun sosial (Thomas, 1996). Sementara itu, dijelaskan pula jika informasi di era media sosial telah menjadi senjata utama dalam membentuk opini publik dan legitimasi politik (Nissen, 2015). Dengan demikian, penyebaran konten OPM dapat dikategorikan sebagai bentuk perang informasi non-konvensional, di mana informasi digunakan bukan untuk mengedukasi, tetapi untuk mempengaruhi dan membelokkan persepsi publik.

Fenomena ini juga sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa kelompok ekstremis sangat diuntungkan dengan adanya teknologi berbasis jaringan internet untuk kepentingan rekrutmen, propaganda, pelatihan, dan pembinaan jaringan mereka (Ghifari, 2017). Artinya, ruang digital kini telah menjadi arena strategis dalam perang opini dan ideologi yang berpotensi melemahkan stabilitas nasional.

Bentuk penyebaran ide separatis yang dikemas melalui visualisasi menarik dan elemen hiburan membuat publik, khususnya generasi muda, sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang berinteraksi dengan konten bermuatan ideologis. Narasi yang dibungkus dalam format ringan seperti video pendek, musik, dan *gameplay* digital menciptakan proses internalisasi pesan yang bersifat persuasif dan emosional. Secara perlahan, strategi ini menumbuhkan simpati publik terhadap perjuangan OPM yang digambarkan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan politik. Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika masyarakat cenderung menjadikan media sosial sebagai sumber utama dalam mencari dan memverifikasi informasi.

Berdasarkan survei yang dikutip oleh melalui *Detik.com*, perilaku pencarian informasi masyarakat telah bergeser secara signifikan. Istilah “*googling*” dinilai mulai kehilangan relevansinya karena sebagian besar pengguna muda kini lebih memilih mencari informasi langsung melalui media sosial, khususnya TikTok. Mengacu pada data survei yang dilakukan oleh *Forbes Advisor* dan *Talker Research* pada April 2024 terhadap 2.000 responden di Amerika Serikat, ditemukan bahwa 45% pengguna Generasi Z lebih memilih mencari informasi melalui media sosial dibandingkan Google, diikuti oleh 35% pengguna Milenial, 20% Generasi X, dan

kurang dari 10% kalangan Boomer (Rosa, 2025). Meskipun data tersebut berasal dari konteks global, tren serupa juga tercermin di Indonesia, dimana peningkatan konsumsi informasi melalui TikTok menandakan perubahan pola pikir digital masyarakat. Kondisi ini menjadi beresiko apabila konten yang dikonsumsi tidak melalui proses filterisasi yang memadai. Jika media sosial terus menyajikan konten yang mengandung ideologi kekerasan atau narasi separatistis, maka masyarakat dengan tingkat literasi digital rendah akan lebih rentan mempercayai narasi yang menyesatkan, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional dan kohesi sosial.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Kekerasan Simbolik yang dikemukakan oleh Bourdieu (1991). Menurut teori ini, dominasi ideologis tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui simbol, bahasa, dan representasi yang diterima secara tidak sadar oleh masyarakat. Bourdieu (1991) menegaskan bahwa kekerasan simbolik terjadi ketika makna dan simbol yang diciptakan oleh pihak dominan diterima sebagai sesuatu yang wajar, sah, dan tidak dipertanyakan secara kritis. Dalam konteks penyebaran narasi separatistis di media sosial, proses ini terlihat ketika ide-ide tentang “keadilan bagi Papua” atau “perjuangan kemerdekaan” dikemas secara emosional dan estetis, sehingga diterima tanpa resistensi oleh publik muda. Dengan demikian, konten digital bernuansa separatistis dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan simbolik, karena ia menanamkan nilai ideologis secara halus ke dalam kesadaran publik tanpa paksaan langsung, namun dengan dampak yang signifikan terhadap persepsi, solidaritas, dan stabilitas nasional.

Tahapan akhir dari proses penyebaran narasi digital ini adalah terbentuknya disinformasi yang dapat melemahkan legitimasi negara. Ketika masyarakat terus-menerus terpapar oleh konten separatistis yang dikemas dengan narasi emosional, mereka perlahan kehilangan kepercayaan terhadap informasi resmi dan institusi negara. Hal ini diperparah dengan mulai ditinggalkannya istilah *googling* untuk melakukan *cross check* terhadap sebuah informasi dari media konvensional yang sudah melalui proses editing dan memastikan kebenaran sumbernya, namun lebih percaya pada konten sosial media yang tidak memiliki proses editing dan sangat mudah untuk disalahgunakan. Dalam konteks ini, konten separatistis berbasis digital berperan sebagai pemicu disintegrasi sosial karena menanamkan persepsi ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa penyebaran disinformasi bukan hanya masalah komunikasi, tetapi juga ancaman terhadap keamanan nasional. Ketika legitimasi negara melemah di ruang digital, maka kekuatan sosial-politik di dunia nyata ikut terpengaruh. Keamanan nasional merupakan totalitas sistem yang melibatkan seluruh instrumen negara untuk menjaga keutuhan bangsa dari ancaman multidimensional” Santoso (2023). Dengan demikian, ancaman siber seperti propaganda digital OPM bukan sekadar gangguan komunikasi, tetapi bagian dari strategi ideologis yang dapat menggoyahkan pondasi stabilitas nasional dan memperlemah integrasi bangsa.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar terhadap konsep keamanan nasional Indonesia. Ruang digital kini menjadi wilayah strategis baru bagi perlombaan menanamkan ideologi, di mana aktor non-negara seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi separatistis yang dikemas dalam bentuk yang lebih ringan seperti hiburan, visualisasi permainan, dan musik. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi hadir dalam bentuk serangan fisik,

melainkan melalui perang informasi (*information warfare*) yang bersifat non-konvensional. Narasi yang disebarakan secara sistematis di media sosial seperti TikTok berhasil membangun simpati publik, terutama di kalangan generasi muda, melalui mekanisme *soft power* dan kekerasan simbolik (Bourdieu, 1991). Dalam konteks ini, keamanan nasional tidak hanya menuntut kesiapan militer, tetapi juga kemampuan negara dalam melindungi ruang siber dari infiltrasi ideologis yang dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan memecah kohesi sosial. Dengan demikian, penyebaran narasi digital bernuansa separatistis seperti OPM dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman multidimensional yang memerlukan respons strategis lintas sektor meliputi keamanan, literasi digital, dan kebijakan media nasional.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan dalam upaya menangkal radikalisme di tengah perkembangan teknologi informasi. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pertahanan siber nasional dengan menekankan aspek deteksi dini dan penanggulangan konten bermuatan separatistis di media sosial, sebagaimana telah diamanatkan dalam *Permenhan No. 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber*. Kedua, diperlukan peningkatan kesadaran publik tentang konsep keamanan nasional sebagai kewajiban semua elemen masyarakat, bukan hanya monopoli milik aparat semata. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang keamanan nasional, pentingnya keamanan nasional, dilakukan dari satuan terkecil di masyarakat yakni Rukun Tetangga (RT). Jika hal ini terjadi maka keamanan nasional akan menjadi kuat dan masyarakat tidak mudah di provokasi. Ketiga, peningkatan kesadaran literasi digital masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, agar mampu mengenali dan menolak bentuk-bentuk diskonfirmasi serta propaganda halus yang tersebar di ruang digital. Upaya ini harus diintegrasikan dengan sistem *Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)* agar partisipasi publik dalam menjaga kedaulatan informasi menjadi bagian dari strategi keamanan nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada analisis konten digital di platform TikTok selama periode 2023–2024, sehingga hasilnya belum mencakup dinamika di platform media sosial lain seperti YouTube, X (Twitter), atau Whatsapp yang juga menjadi media penyebaran ideologi mengingat pengguna media sosial tersebut juga cukup besar di Indonesia. Kedua, pendekatan analisis kualitatif deskriptif yang digunakan memberikan pemahaman mendalam terhadap makna dan simbol, tetapi belum dapat mengukur tingkat pengaruh konten secara kuantitatif terhadap opini publik. Oleh karena itu diperlukan analisis lebih mendalam kedepannya tentang dampak nyata terhadap konten-konten radikal tersebut. Ketiga, data yang digunakan berasal dari observasi daring dan studi literatur, tanpa melibatkan wawancara mendalam dengan pembuat konten atau aparat keamanan, sehingga dimensi strategis dalam penanggulangan ancaman belum tergali secara empiris.

DAFTAR REFERENSI

- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
- CNBC Indonesia. (2024, February 5). *Jumlah pengguna media sosial Indonesia capai 139 juta, TikTok menempati posisi keempat terbanyak*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Ghifari, M. (2017). *Radikalisme di dunia maya dan ancaman terhadap keamanan nasional*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 7(2), 45–60.
- Hanifah, N. E., Rahmawati, D., & Wibisono, A. (2021). *Pengaruh media sosial terhadap konflik sosial di masyarakat digital*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 25(3), 178–189.

-
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Nissen, T. (2015). *The Weaponization of Social Media: Characteristics of Contemporary Conflicts*. Royal Danish Defence College.
- Rosa, A. (2025, April 10). *Gen Z Mulai Tinggalkan Google, Lebih Percaya TikTok hingga ChatGPT*. Detik.com. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7648684/gen-z-mulai-tinggalkan-google-lebih-percaya-tiktok-hingga-chatgpt>.
- Santoso, P. (2023). *Bahan Ajar Mata Kuliah Keamanan Nasional: Analisa Elemen Keamanan Nasional: Konsep dan Tantangan Era Siber*. Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
- Thomas, T. L. (1996). *Information Warfare: New Challenges for the United States*. *Parameters*, 26(3), 65–77.
- We Are Social. (2024). *Digital 2024: Indonesia Report*. We Are Social & Meltwater. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>